

Strategi Inovasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Banggai Untuk Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat

Innovation Strategy of Banggai District Library and Archive Office To Improve The Culture of Community Literacy

Ladiatno Samsara

Lembaga Administrasi Negara, Republik Indonesia
E-mail korespondensi: samsaraladiatno11@gmail.com

Abstrak

Budaya literasi belum sepenuhnya familiar di kalangan masyarakat. Melalui tulisan ini digambarkan strategi inovasi untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Metode penelitian kualitatif dengan studi literatur dan lapangan dijadikan sebagai pilihan dalam menggambarkan strategi untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat di Kabupaten Banggai. Strategi inovasi yang diimplementasikan terkait pengelolaan perpustakaan dengan jaringan yang luas; memiliki akses cepat, tepat dan mampu memberikan pelayanan secara maksimal; kebaruan ditekankan pada media pencarian dan perilaku pemustaka; perpustakaan keliling di lokasi wisata; pojok simputnyo dan arsip digital. Selain strategis tersebut, dukungan pemimpin dalam peningkatan budaya literasi menjadi salah satu lngkah agar budaya literasi di Kabupaten Banggai meningkat

Kata kunci: budaya literasi, strategi, inovasi, perpustakaan

Abstract

Literacy culture not yet familiar among the community. This papper describe innovation strategy to increase literacy culture people in Bangga Regency, Central Sulawesi Province. Qualitative research method with literature and field study choices to describe innovation strategy to increase literacy culture people in Bangga Regency. Innovation strategy can describe: library manage with an extensive network connection, have a fast access, precise and able to provide maximum service; innovation focus in searching tools and librarian habit; mobile library in tourist site; pojok simputnyo and digital archive. Non only the strategies, but also sipport of leaders for increase literation culture can made one of strategy to increase literacy culture in Banggai Regency

Keywords: literacy culture, strategy, innovation, library

Samsara, Ladiatno: "Strategi Inovasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Banggai Untuk Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat"

Pendahuluan

Budaya literasi masyarakat Indonesia masih dianggap rendah. Berdasarkan hasil penelitian Perpustakaan Nasional tahun 2017 yang dikutip oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, rata-rata orang Indonesia hanya membaca buku sebanyak 3-4 kali seminggu dengan durasi waktu membaca perhari hanya 30-59 menit (Nadlir, dikutip dari Kompas, 26 Maret 2018). Penelitian ini memperlihatkan bahwa dari seluruh jenjang usia, rata-rata waktu yang dihabiskan untuk membaca kurang dari satu jam.

Hal ini menjadi alarm bahaya, khususnya bagi anak usia sekolah. Hal ini dikarenakan, durasi waktu membaca anak-anak sekolah, berdasarkan penelitian ini, kurang lebih hanya 20% waktu sekolah yang dihabiskan untuk membaca. Selebihnya belum bisa dikalkulasikan, apbvukah waktu yang dihabiskan tersebut untuk mendengarkan guru memberikan materi pelajaran, bermain atau mengerjakan tugas.

Rendahnya kualitas literasi Indonesia juga disampaikan oleh United Nations Development Program (UNDP). Dari 61 negara yang menjadi subjek penelitian UNESCO, Indonesia menduduki peringkat ke-60. Peringkat satu diduduki oleh Finlandia. Hal ini mengindikasikan bahwa literasi belum menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia, didalamnya juga anak suai sekolah.

Nurul Iswari, seperti ditulis dalam Kumparan.com menyebutkan bahwa rendahnya minat baca masyarakat disebabkan oleh tiga faktor yaitu: belum ada kebiasaan membaca yang ditanamkan sejak dini. Kebiasaan membaca ini belum di budayakan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Kedua, Akses untuk sarana pendidikan terbatas. Khususnya perpustakaan. Hal ini dikarenakan, perpustakaan masih identik dengan fasilitas pendidikan. Misalnya perpustakaan masih melekat dengan sekolah. Ketiga, masih kurangnya produksi buku di Indonesia sebagai dampak dari belum berkembangnya penerbit di daerah, insentif bagi produsen buku dirasa belum adil, dan wajib pajak bagi penulis yang mendapatkan royalti rendah sehingga memadamkan motivasi mereka untuk melahirkan buku berkualitas.

Tiga faktor diatas mewakili tiga kondisi yang berbeda. Pertama lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga belum menjadi *agent* untuk membentuk budaya membaca. Kedua sarana infrastruktur penunjang pendidikan dan ketiga distribusi alat kelengkapan literasi yang tidak merata. Alat kelengkapan literasi memiliki kesenjangan antara di pusat kota dengan wilayah di luar pusat kota. Misalnya keberadaan perpustakaan hanya tersentral di kota dan di desa hanya terdapat perpustakaan dengan dengan koleksi yang berbeda.

Ketiga hal ini dapat dipecahkan secara sendiri sendiri maupun terintegrasi. Tergantung dari sudut pandang penyelesaian permasalahannya. Terintegrasi bisa dilakukan agar penyelesaian permasalahan lebih holistik.

Namun, khusus untuk permasalahan ketiga, pemerintah telah menggalakkan program pengiriman buku gratis ke setiap daerah. Pengiriman ini dilakukan secara rutin, setiap tanggal 17. Program ini dimungkinkan akan bisa memudahkan ketersediaan dan pemerataan buku di setiap daerah.

Akan tetapi, untuk permasalahan pertama dan kedua, belum ada solusi komprehensif yang bisa dilakukan. Solusi komprehensif misalnya mengintegrasikan antara dua permasalahan diatas menjadi satu. Dipenuhinya infrastuktur pendukung (perpustakaan) dan kampanye budaya membaca. Kedua hal ini bisa berjalan beriringan. Infrastruktur pendukung (perpustakaan) lebih banyak serta kampanye budaya membaca dilakukan secara masif.

Hal ini bisa diartikan dengan memperkuat perpustakaan yang sudah ada saat ini serta membuka perpustakaan lain. Memperkuat perpustakaan dengan melakukan diversifikasi produk layanan. Diversifikasi produk bisa menjadi salah satu kriteria perpustakaan yang ideal.

Hasil penelitian dari Aliyatin Nafisah memperlihatkan bahwa perpustakaan yang ideal harus memenuhi empat kriteria yaitu pengelola perpustakaan haruslah memiliki jaringan keluar yang luas, memiliki akses cepat, tepat dan mampu memberikan layanan secara maksimal, memiliki koleksi buku yang lengkap, perpustakaan hendaknya memiliki agenda rutin (mingguan, bulanan atau tahunan) untuk mengadakan kegiatan diskusi, debat, seminar atau kegiatan sejenisnya untuk menambah daya Tarik pengunjung. (Nafisah, 2014). Keempat kriteria tersebut mengharuskan perpustakaan untuk bisa bergerak baik keluar maupun ke dalam.

Sampai saat ini perpustakaan yang beroperasi paling banyak merupakan perpustakaan milik pemerintah. Baik itu perpustakaan sekolah maupun perpustakaan umum atau perpustakaan daerah. Karena milik pemerintah, jam operasional perpustakaan juga mengikuti jam kerja pemerintah. Berdasarkan survei Rochani Nani Rahayu di 123 perpustakaan di Pulau Jawa, hanya terdapat 29 perpustakaan yang buka setiap hari. Selebihnya hanya memiliki empat hari layanan. Melihat kondisi ini tentunya perpustakaan harus mampu untuk bisa bergerak lebih jauh. Memberikan pelayanan lebih ke masyarakat.

Untuk bisa memberikan pelayanan lebih ke masyarakat, inovasi merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan oleh perpustakaan. Khususnya perpustakaan milik pemerintah baik

Samsara, Ladiatno: "Strategi Inovasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Banggai Untuk Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat"

perpustakaan umum maupun perpustakaan daerah. Inovasi harus mampu menjadi pintu keluar dari segala kebuntuan sistem di sektor publik.

Kebuntuan sistem yang dimaksud disini berupa keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan perpustakaan. Keterbatasan ini akan membelenggu masyarakat. Oleh sebab itu, inovasi dimungkinkan akan menjadi pemecah kebuntuan serta pemantik untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat.

Inovasi dapat dilakukan dengan *knowledge management* (manajemen pengetahuan) di perpustakaan (Hildawati Almah, 2013). Lebih lanjut dijelaskan oleh Hendro Wicaksono (2016), salah satu komponen *knowledge management* adalah ketersediaan alat (*tool*) sebagai salah satu sarana untuk berbagi pengetahuan.

Kondisi Existing Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Banggai

Perpustakaan Kabupaten Banggai merupakan perpustakaan daerah yang melekat pada Dinas Perpustakaan dan Arsip. Dinas Perpustakaan dan Arsip membina beberapa perpustakaan yang terdapat di Kabupaten Banggai.

Beberapa perpustakaan tersebut diantaranya: Perpustakaan desa atau kelurahan (51), perpustakaan sekolah (92) yang terdiri dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, perpustakaan perguruan tinggi (3), dan perpustakaan khusus (3). Keseluruhan perpustakaan ini berada di wilayah Kabupaten Banggai.

Secara umum, perpustakaan yang terdapat di Kabupaten Banggai telah memuka jam layanan operasional selama enam hari kerja. Mulai dari hari senin sampai sabtu. Namun, khusus untuk hari sabtu, jam buka layanan hanya sampai pukul 14.00 waktu setempat. Sedangkan untuk hari lainnya buka mulai pukul 08.00-16.00 dan 16.30. Jalm kerja ini mengikuti jam kerja pemerintah di Kabupaten Banggai.

Dari seluruh perpustakaan yang terdapat di Kabupaten Banggai, terdapat total 9.516 judul dari 28.226 koleksi (RI, 2011). Koleksi tersebut terdiri dari koleksi non fiksi (7.712 judul/eksemplar, koleksi referensi terdiri dari 75 judul/eksemplar, koleksi terbatas berseri, koleksi karya tulis ilmiah, koleksi peta dan koleksi VCD/DVD.

Koleksi tersebut dapat dinikmati oleh sebanyak 1883 anggota perpustakaan yang telah terdaftar. Anggota perpustakaan ini mayoritas adalah mahasiswa dengan prosentase 55%. Selain itu terdapat juga masyarakat umum (18%), pegawai (18%), dosen (8%) dan ABRI/POLRI (1%). Namun, peta sebaran anggota perpustakaan ini belum memasukkan untuk pelajar. Dalam data diatas, tidak terlihat prosentase pelajar sebagai anggota dari perpustakaan Kabupaten Banggai. Sedangkan untuk layanan perpustakaan terdiri dari

berbagai jenis layanan. Layanan ini diantaranya layanan baca di tempat, layanan keanggotaan, layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan pinjam antar perpustakaan, layanan perpustakaan keliling, layanan bimbingan atau pendidikan pemustaka, layanan penelusuran literature, layanan deposit koleksi daerah/lokal dan layanan bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan.

Apabila dikelompokkan, yang berhubungan langsung dengan pengguna perpustakaan tidaklah banyak. Misal layanan baca di tempat, layanan keanggotaan, layanan referensi, layanan perpustakaan keliling dan layanan penelusuran literature. Seangkan layanan lainnya diberikan bukan untuk target utama pelanggan perpustakaan.

Selain itu, Dinas Perpustakaan dan Arsip juga memberikan berbagai kegiatan promosi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di perpustakaan. Kegiatan promosi yang dilakukan diantaranya : menyebarkan pamflet, leaflet, brosur dan media promosi lainnya, menyelenggarakan sosialisasi ke sekolah, mengadakan kegiatan pameran buku/perpustakaan, menyelenggarakan lomba terkait minat baca dan budaya baca, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dengan tujuan pemasyarakatan minat dan budaya baca.

Kegiatan promosi diatas dapat diartikan bahwa secara program, Dinas Perpustakaan dan Arsip, telah memiliki program yang relative bagus untuk upaya meningkatkan minat baca masyarakat. Program yang telah disusun ini bisa dijadikan sebagai landasan kegiatan-kegiatan inovatif.

Kerangka Konseptual

Strategi inovasi untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan bisa dikembangkan menggunakan kerangka konseptual sebagai berikut.

Budaya Literasi

Secara sederhana, literasi dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan membaca dan menulis (Seminar, Bulan, & Unib, 2015). Kemampuan untuk mampu membaca banyak hal dan menulis banyak hal juga. Kemampuan ini akan bisa menjadikan seorang individu untuk mudah memahami sesuatu serta peka dengan lingkungan sekitar.

Menurut Haryanti literasi adalah keberaksaraan yaitu kemampuan menulis dan membaca. Selanjutnya budaya literasi adalah untuk melakukan kebiasaan berfikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca dan menulis sehingga dalam proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya(Mursalim, 2017).

Samsara, Ladiatno: "Strategi Inovasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Banggai Untuk Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat"

Budaya literasi bisa dikembangkan atau ditumbuhkan. Proses untuk mengembangkan atau menumbuhkan budaya literasi dilakukan melalui pendekatan kultural diantaranya:

1. Pengenalan budaya (tradisi atau kebiasaan masyarakat)
2. Pengenalan tokoh masyarakat (pemilik pengaruh misalnya kepala desa atau kepala agama)
3. Pengenalan fasilitas yang ada di masyarakat (fasilitas umum misalnya perpustakaan)
4. Pengenalan alam dan kondisi lingkungan (alam geografis, lingkungan dan potensi)
5. Pengenalan kearifan lokal (petuah dan aturan). (Mursalim, 2017)

Walaupun dalam perkembangannya literasi dimaknai secara luas seperti literasi komputer, literasi media, literasi teknologi, literasi ekonomi, literasi informasi, bahkan juga literasi moral. Namun, dalam tulisan ini, literasi dimaknai sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis.

Budaya literasi dimaknai sebagai budaya dan literasi. Budaya menurut Selo Soemardjan sebagai sebuah sarana hasil karya, cipta dan rasa yang dimiliki oleh manusia. Menurut Mulyana dan Jalaludin Rahmat budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh yang bersifat kompleks, abstrak dan luas. Sehingga budaya dapat dimaknai sebagai cara hidup bagi sekelompok orang yang hidup bersama, yang dalam mencoba untuk menjadi bersama dalam kelompok dibuat sebuah hasil karya, cipta dan rasa yang diterima, dipelajari dan digunakan secara bersama serta diturunkan dari satu generasi ke generasi lain (Budaya & Indonesia, 2018).

Sehingga budaya literasi merupakan kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol tulis sebagai keterampilan hidup dalam bermasyarakat yang manfaatnya bisa dirasakan bersama dan dipelajari serta diturunkan pada generasi selanjutnya (Budaya & Indonesia, 2018). Budaya literasi memerlukan wadah untuk tumbuh dan berkembang.

Wadah untuk tumbuh dan berkembangnya literasi salah satunya dilakukan oleh perpustakaan. Perpustakaan dalam pengertian tradisional diartikan sebagai suatu unit terorganisir yang terdiri dari tiga unsur yaitu buku, ruang dan pustakawan. Walaupun paradigm perpustakaan mulai bergeser seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, akan tetapi ketiga unsur perpustakaan tersebut tetap menjadi prasyarat utama sebuah perpustakaan (Budaya & Indonesia, 2018).

Unsur buku yang menjadi penguat bahwa wadah untuk mengembangkan budaya literasi adalah perpustakaan. Hal ini dikarenakan perpustakaan yang menjadi tempat koleksi buku dan literature menyediakan berbagai macam sumber bacaan.

Lebih lanjut, perpustakaan juga menjadi lembaga pengelola pengetahuan. Sebagai lembaga pengelola pengetahuan, perpustakaan memproses tatakelola pengetahuan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Identifikasi pengetahuan, melakukan identifikasi pengetahuan yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan oleh pemustaka;
2. Akuisisi pengetahuan, pengetahuan eksplisit yang tertulis dalam bentuk cetak maupun digital diakuisisi agar bisa berada di perpustakaan;
3. Transfer pengetahuan, setiap koleksi perpustakaan bisa diakses oleh siapaun tanpa melihat harkat, pangkat dan jabatan seseorang;
4. Pengubahan pengetahuan, melibatkan proses inovasi dalam konteks perpustakaan bisa diimplementasikan dalam bentuk penulisan data bibliografis koleksi maupun perubahan dalam bentuk alih koleksi menjadi sesuatu yang baru, misalnya bentuk cetak menjadi digital;
5. Penyimpanan pengetahuan, bagaimana pengetahuan disimpan dan ditata agar semua orang bisa mengakses kembali dengan mudah (di rak maupun dalam bentuk basis data);
6. Penggunaan kembali pengetahuan baik dalam bentuk cetak maupun digital oleh pemustaka hanya dimungkinkan melalui akses ke perpustakaan. Pengetahuan yang tidak diartikulasikan dan didokumentasikan apalagi intrinsik, akan sulit untuk digunakan kembali oleh orang lain (Budaya & Indonesia, 2018).

Strategi Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi pelayanan publik menjadi isu penting dalam perkembangan pelayanan publik di Indonesia akhir-akhir ini. Inovasi menjadi penambah spirit dalam pelaksanaan pelayanan publik. Pelayanan publik menurut Undang-undang No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang.

Pelayanan publik sejatinya merupakan sebuah bentuk pemberian pelayanan dari organisasi publik ke masyarakat. Sebagai sebuah pemberian pelayanan ke masyarakat,

Samsara, Ladiatno: "Strategi Inovasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Banggai Untuk Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat"

sejatinya pelayanan publik harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Penyesuaian diri ini dapat dilakukan melalui pembaharuan atau inovasi.

Roger mengatakan bahwa inovasi merupakan sebuah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya (Suwarno, 2006). Ancok memiliki pendapat lain. Inovasi diartikan sebagai suatu proses memikirkan dan mengimplementasikan pemikiran tersebut sehingga menghasilkan hal baru berbentuk produk, jasa, proses bisnis, cara baru, kebijakan dan lain sebagainya (Pusat & Tata, n.d.).

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendefinisikan inovasi sebagai suatu proses memikirkan dan mengimplementasikan suatu ide dan gagasan yang memiliki unsur kebaruan dan kemanfaatan. Kebaruan dan kemanfaatan menjadi kata kunci dalam definisi inovasi yang disampaikan oleh LAN (pedoman Laboratorium Inovasi).

Inovasi dibagi dalam beberapa kategori berdasarkan originalitasnya diantaranya:

1. *Incremental-radical innovations*, inovasi yang berhubungan dengan tingkat keaslian dari inovasi. Misal inovasi yang bersifat perbaikan incremental pada sektor industry;
2. *Top down innovations-bottom up innovations*, inovasi yang dilakukan untuk menjelaskan siapa yang memimpin perubahan perilaku. *Top* berarti manajemen atau organisasi yang lebih tinggi, sedangkan *bottom* merujuk pada pekerja atau pegawai yang menjadi pelaksana sebuah pekerjaan;
3. *Needs led innovations and efficiency led innovations*, proses inovasi yang diinisiasi telah menyelesaikan permasalahan dalam rangka meningkatkan efisiensi pelayanan, produk dan prosedur (Pusat & Tata, n.d.).

Selain itu, dalam proses pelaksanaannya inovasi dibagi dalam beberapa jenis. Jenis-jenis inovasi ini akan memudahkan untuk melakukan pengkategorian inovasi. Beberapa jenis inovasi diantaranya sebagai berikut :

1. Inovasi proses, dilakukan untuk upaya peningkatan kualitas proses kerja baik di internal maupun eksternal secara lebih sederhana dan efisien;
2. Inovasi metode, merupakan cara khusus dalam melakukan sesuatu yang dapat memiliki banyak macam bentuk, sektor dan dimensi;
3. Inovasi produk, dilakukan dengan menciptakan produk baru atau memodifikasi produk lama;
4. Inovasi konseptual, berupa inovasi yang berada di lingkup konsep dengan hasil berupa paradigma, ide gagasan, pemikiran dan terobosan baru;
5. Inovasi teknologi, inovasi yang berbentuk pembaharuan peralatan atau perangkat untuk menunjang pekerjaan;

6. Inovasi struktur organisasi, berupa pengadopsian model organisasi baru yang menggantikan model lama yang tidak sesuai perkembangan organisasi;
7. Inovasi hubungan, sebuah bentuk dan mekanisme baru dalam berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama;
8. Inovasi Sumber Daya Manusia, perubahan kebijakan untuk meningkatkan kualitas tata nilai dan kapasitas dari SDM (Pusat & Tata, n.d.).

Keseluruhan jenis inovasi ini bisa berdiri sendiri dan bisa berjalan beriringan. Hal ini bisa dilihat dari bentuk sebuah inovasi tersebut. Namun, dalam praktiknya seringkali dijumpai satu inovasi dengan berbagai jenis inovasi didalamnya.

Sebuah inovasi dimungkinkan untuk memiliki beberapa kriteria, diantaranya:

1. Memiliki kebaruan
Inovasi yang akan dilakukan minimal harus memiliki unsur kebaruan. Kebaruan baik dalam unsur maupun holistik.
2. Memiliki kemanfaatan
Inovasi yang dilakukan harus memiliki kemanfaatan didalamnya. Kemanfaatan baik bagi luar organisasi maupun dalam organisasi.
3. Memberikan solusi
Inovasi muncul dan berkembang untuk bisa memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Inovasi memberikan cara baru, langkah dan semangat baru bagi organisasi.
4. Memiliki kompatibilitas dengan sistem diluar dirinya
Inovasi harus bisa menyesuaikan dengan sistem diluar dirinya. Artinya inovasi yang berjalan harus sesuai dengan sistem yang terdapat di luar inovasi tersebut. Lantas, apakah disruptive inovasi tidak bisa dilakukan. Tentunya, masih bisa dilakukan. Disruptive inovasi walaupun bersifat mengganggu sistem yang telah berjalan namun apabila masih dalam lingkungan yang sama dan memiliki kesesuaian dengan sistem maka itu masih bisa disebut dengan inovasi. Mislanya, adanya inovasi toko online, inovasi ini masih berada dalam lingkungan yang sama yaitu perdagangan. Namun, hanya merubah kebiasaan pembeli dari belanja konvensional menjadi belanja online.
5. Berkesinambungan dan dapat direplikasi
Inovasi yang dijalankan dimungkinkan untuk bisa berjalan secara konsisten. Inovasi yang lahir dan berkembang dimungkinkan untuk bisa melahirkan inovasi yang baru. Selain itu, pelaksanaan inovasi juga dimungkinkan untuk tetap berjalan dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

Samsara, Ladiatno: "Strategi Inovasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Banggai Untuk Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat"

Selain itu, dalam sektor publik, inovasi juga diharapkan bisa untuk direplikasi. Hal ini dilakukan sebagai bagian untuk mengembangkan inovasi dan organisasi. Untuk mengembangkan inovasi, replikasi memungkinkan inovasi untuk dapat diimplementasikan di unit kerja lainnya.

Dengan dimungkinkannya inovasi diimplementasikan di unit kerja lain, juga diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja organisasi. Kinerja organisasi bisa disokong oleh adanya inovasi. Tentunya inovasi yang memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh organisasi (Samsara, 2017).

Dengan berbagai jenis inovasi diatas, lantas tidak membuat sebuah inovasi susah untuk dilakukan. Dalam buku *Hanbook* Inovasi Administrasi Negara dijelaskan bahwa inovasi dapat dengan mudah dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya:

1. Berhenti untuk berencana dan lakukan, inovasi yang baik adalah inovasi yang terimplementasi. Artinya inovasi tersebut digunakan dan bisa menyelesaikan permasalahan yang muncul.
2. Internalisasi dan sosialisasi, inovasi bisa berjalan melalui internalisasi di lingkup anggota kelompok. Internalisasi penting dilakukan untuk membangun kesamaan maksud dan tujuan.
3. Berani mengambil risiko, inovasi biasanya melahirkan kebaruan. Dan kebaruan tersebut tentunya belum bisa diterima secara utuh oleh anggota organisasi. Oleh sebab itu, dengan melahirkan inovasi tentunya harus mampu mengambil risiko yang dihadapinya. Terutama risiko dalam proses implementasi (Pusat & Tata, n.d.).

Akan tetapi, dalam implementasinya, inovasi harus dijalankan dengan menggunakan strategi. Hal ini dimaksudkan agar tujuan akhir organisasi yang akan dibangun melalui inovasi dalam dicapai.

Strategi diartikan sebagai pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai tujuan organisasi (Nugraha, 2014). Sebagai pilihan, maka terdapat berbagai macam alternative langkah-langkah yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi.

Pendapat lain disampaikan oleh Quinn (1990), strategi merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan dan aksi utama dalam hubungan yang kohesif. Sedangkan Anthiny, Parrewe dan Kacmar (1999) mendefinisikan strategi sebagai formulasi misi dan tujuan organisasi, termasuk juga didalamnya terdapat rencana aksi untuk mencapai tujuan tersebut (Rizki Subekja, 2017).

Strategi dalam tulisan ini dielaborasi dengan inovasi menjadi sebuah strategi inovasi. Apabila digambarkan, strategi inovasi merupakan sebuah pola atau rencana inovasi yang akan digunakan sebagai sebuah rencana aksi untuk mencapai tujuan organisasi.

Begitu juga dengan strategi inovasi ini dilakukan untuk menjadi pemicu perkembangan budaya literasi bagi masyarakat Kabupaten Banggai. Budaya literasi dimungkinkan bisa dikembangkan dengan banyaknya inovasi yang muncul khususnya dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Banggai.

Tantangan untuk meningkatkan budaya literasi di Kabupaten Banggai

Budaya literasi yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2016 menjadikan budaya literasi sebagai program yang harus diimplementasikan oleh setiap daerah. Tidak terkecuali Kabupaten Banggai.

Implementasi budaya literasi bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan, sebagai instansi yang memiliki koordinasi langsung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, selain Dinas Pendidikan, budaya literasi juga secara tidak langsung menjadi tanggung jawab unit kerja lain seperti Dinas Perpustakaan dan Arsip. Hal ini dikarenakan, Dinas Perpustakaan dan Arsip menjadi unit kerja yang mengordinasikan seluruh perpustakaan di Kabupaten Banggai.

Sebagai unit yang mengorganisasikan seluruh perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Peningkatan minat baca salah satunya dilakukan dengan budaya literasi.

Namun, dalam perjalanannya, dimungkinkan terdapat beberapa tantangan yang melingkupinya. Tantangan yang berasal dari internal maupun eksternal. Tantangan ini memiliki ruang lingkup yang berbeda.

Tantangan internal, mulai dari sumber daya manusia baik di Dinas Perpustakaan dan Arsip maupun di perpustakaan dan anggaran yang diberikan juga terbatas. Untuk tantangan eksternal terkait dengan kultur atau budaya masyarakat.

Tantangan internal, sumber daya manusia di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Banggai dan pengelola perpustakaan. SDM di Dinas Perpustakaan dan Arsip, apabila dilihat berdasarkan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN), terdiri mulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sampai Pelaksana. Sehingga apabila dilihat dari jabatan, cukup mumpuni untuk menjalankan tugas Dinas Perpustakaan dan Arsip. Begitu juga untuk tugas unit pengelola perpustakaan.

Samsara, Ladiatno: "Strategi Inovasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Banggai Untuk Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat"

Namun, terkait kompetensi terkait perpustakaan itu yang bisa dikembangkan. Mindset pegawai saat ini masih menganggap bahwa pekerjaan di perpustakaan hanya sebatas untuk melakukan pengadaan buku, memajang buku dan menyimpan koleksi buku. Padahal, terdapat kompetensi untuk membudayakan literasi juga. Membudayakan literasi masyarakat akan menjadi tantangan bagi Dinas Perpustakaan dan Arsip serta pengelola perpustakaan. Hal ini menjadi tantangan yang berat karena membudayakan literasi untuk masyarakat berarti juga harus bisa membuka mindset masyarakat terkait pentingnya membaca dan menambah wawasan.

Tantangan lainnya terkait dengan anggaran. Anggaran Dinas Perpustakaan dan Arsip tahun 2018 sebesar Rp. 1.892.287.680. Sedangkan untuk tahun 2019 sebesar Rp. 2.365.359.600. Terdapat kenaikan anggaran sebesar 25%. Kenaikan anggaran inilah yang bisa diwujudkan untuk membuat program atau kegiatan yang menarik minat masyarakat untuk berliterasi.

Artinya, besaran anggaran bisa dioptimalkan untuk memberikan pelayanan ke masyarakat. Pelayanan terkait dengan peningkatan budaya literasi masyarakat. Bentuk pelayanan yang diberikan dimungkinkan tidak bersifat rutin dan mengulang. Bisa dikembangkan kegiatan bisa memberikan solusi atas kendala yang dihadapi dalam mengembangkan budaya literasi masyarakat.

Tantangan eksternal terkait dengan kultur atau budaya masyarakat. Budaya masyarakat menganggap bahwa perpustakaan masih menjadi tempat yang tidak asyik, sepi dan hanya bisa diakses oleh orang tertentu. Kultur ini telah melekat lama di masyarakat.

Bahkan ada yang menganggap bahwa perpustakaan hanya tempat bagi pelajar atau mahasiswa. Sehingga masyarakat umum segan untuk berkunjung ke perpustakaan. Bahkan beberapa masyarakat, selain pelajar dan mahasiswa, belum pernah merasakan masuk dalam sebuah perpustakaan. Kondisi ini yang bisa menjadi titik tolak bagi Dinas Perpustakaan dan Arsip untuk mengembangkan layanan.

Pengembangan sebuah cara untuk merubah mindset masyarakat. Merubah mindset bahwa Perpustakaan bukan lagi menjadi tempat yang spesifik khusus untuk pelajar atau mahasiswa. Perpustakaan bisa menjadi tempat berkumpul masyarakat. Tempat belajar seluruh lapisan masyarakat mulai pelajar sampai petani.

Untuk merubah mindset tersebut, juga diikuti dengan pengembangan sarana dan prasarana pendukung. Khususnya bahan-bahan bacaan. Bahan bacaan mengikuti target layanan perpustakaan. Misalnya perpustakaan dilokasi masyarakat petani, terdapat bahan

bacaan khusus untuk pengetahuan pertanian atau masyarakat yang mayoritas nelayan, perpustakaan menyediakan bacaan khusus untuk sektor perikanan dan kelautan.

Strategi inovasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Banggai

Untuk bisa mengembangkan budaya literasi masyarakat, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Banggai, melalui jaringan perpustakaan yang dimiliki, bisa melakukan beberapa kegiatan inovatif. Kegiatan inovatif merupakan kegiatan yang memiliki unsur kebaruan dan kemanfaatan. Kegiatan yang berbeda dengan kegiatan sebelumnya. Berbeda ini menjadi ukuran inovatif. Perbandingan ini akan menjadi tolak ukur kegiatan inovatif yang dilakukan.

Kegiatan inovatif yang dilakukan memiliki ruang lingkup internal maupun eksternal. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Aliyatin Nafisah, bahwa perpustakaan yang ideal harus memenuhi empat kriteria yaitu pengelola perpustakaan haruslah memiliki jaringan keluar yang luas, memiliki akses cepat, tepat dan mampu memberikan layanan secara maksimal, memiliki koleksi buku yang lengkap, perpustakaan hendaknya memiliki agenda rutin (mingguan, bulanan atau tahunan) untuk mengadakan kegiatan diskusi, debat, seminar atau kegiatan sejenisnya untuk menambah daya Tarik pengunjung.

Empat kriteria diatas, diimplementasikan oleh Dinas perpustakaan Kabupaten Banggai dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang agresif dan tidak rutin. Kegiatan ini juga mendukung capaian untuk membentuk budaya literasi masyarakat.

1. Kriteria pertama terkait dengan pengelola perpustakaan harus memiliki jaringan keluar yang luas. Kriteria ini diterjemahkan melalui kegiatan inovatif, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Banggai, membuat kemitraan dengan pihak lain seperti perguruan tinggi, sekolah, pondok pesantren, desa dan komunitas baca.

Kegiatan ini berbeda dengan kegiatan rutin Dinas Perpustakaan dan Arsip. Apabila kegiatan rutin yang biasa dilakukan selalu berhubungan dengan pemustaka dan layanan perpustakaan, maka untuk kegiatan diatas ini berhubungan dengan stakeholder selain perpustakaan.

Kemitraan dengan pihak lain memungkinkan bagi masyarakat untuk bisa lebih mudah mengakses perpustakaan. Walaupun telah terdapat berbagai perpustakaan di desa, sekolah, maupun perguruan tinggi, namun penyebarluasan wilayah perpustakaan menjadi kebutuhan yang tidak bisa dielakkan.

Kemitraan dengan pihak lain, bukan hanya berupa penyediaan infrastruktur perpustakaan, namun juga kampanye gemar membaca dan menunjangi perpustakaan

Samsara, Ladiatno: "Strategi Inovasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Banggai Untuk Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat"

akan mudah untuk disosialisasikan. Caranya, Dinas Perpustakaan dan Arsip menggandeng pengelola perpustakaan lokal untuk bisa melakukan kampanye.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No.43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Pada pasal 14 ayat 6 dijelaskan bahwa layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerjasama antarperpustakaan. Kemitraan dengan pihak lain untuk mengkampanyekan gemar membaca juga menjadi bagian dari amanat pasal tersebut. Sehingga, dari sisi komabilitas atau kesesuaian dengan lingkungan diluar sistem, kegiatan kemitraan dengan pihak lain relevan untuk diimplementasikan.

Perpustakaan lokal menjadi adik asuh dari Dinas Perpustakaan dan Arsip. Dinas perpustakaan dan Arsip akan menjadi kakak asuh. Pola hubungan ini akan mempermudah rantai kampanye gemar membaca untuk meningkatkan budaya literasi.

Sebagai kegiatan inovatif, kemitraan dengan pihak lain memiliki kriteria inovasi didalamnya. Seperti kebaruan. Kegiatan kemitraan dengan pihak lain merupakan kegiatan yang berbeda dengan beberapa kegiatan lain. Khususnya dalam kemitraan. Pihak lain sebagai anak asuh akan berperan sebagai mitra dengan sesama anak asuh. Kedua belah pihak bisa melakukan pertukaran koleksi perpustakaan untuk menambah referensi.

Bahkan yang lebih penting, kampanye gemar membaca, saat ini tidak lagi dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip, melainkan juga telah menggandeng pengelola perpustakaan di masing-masing wilayah. Pemberdayaan pengelola perpustakaan bisa mendekatkan perpustakaan ke masyarakat.

Kegiatan kedua, masih terkait dengan kegiatan pertama yaitu program satu desa satu perpustakaan. Program ini memungkinkan perpustakaan untuk tersedia di masing-masing desa.

Kebaruan dari program satu desa satu perpustakaan yaitu adanya program pembuatan perpustakaan yang dilakukan di seluruh desa. Selain itu, program satu desa satu perpustakaan bermanfaat bagi masyarakat desa. Hal ini dikarenakan program ini akan mendekatkan perpustakaan pada masyarakat.

Sampai saat ini, berdasarkan informasi yang dihimpun melalui Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai, terdapat 337 desa dan kelurahan. Sehingga akan ada 337 perpustakaan desa.

Namun, sampai saat ini, perpustakaan desa yang baru bisa direalisasikan sebanyak 51 perpustakaan desa. Jumlah yang memang belum signifikan. Namun, sudah

menunjukkan progress yang baik. Hal ini dikarenakan, program satu desa satu perpustakaan diinisiasi tahun 2018. Artinya pelaksanaan kegiatan belum berjalan genap satu tahun.

Program satu desa satu perpustakaan memiliki tujuan untuk lebih mengenalkan desa melalui perpustakaan. Masing-masing perpustakaan akan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tergantung desa masing-masing. Penguatan karakter desa ini akan menjadi pembeda dengan perpustakaan lain. Misal dengan perpustakaan daerah yang menjadi induk atau kakak asuh dari perpustakaan desa.

Program satu desa satu perpustakaan dikhususkan bagi masyarakat desa. Lebih khusus lagi masyarakat yang tidak bisa mengakses perpustakaan umum, misalnya perpustakaan daerah maupun perpustakaan sekolah atau universitas. Walaupun tidak menutup kemungkinan siswa atau mahasiswa juga dapat mengakses perpustakaan ini. Selain itu, perpustakaan desa juga dilengkapi dengan sarana bermain. Khususnya untuk anak balita. Hal ini dikarenakan perpustakaan desa mayoritas melekat dengan kantor desa atau kelurahan. Lokasi kantor desa atau kelurahan juga terdapat taman pendidikan balita (*playgroup* dan taman kanak-kanak) sehingga relevan ketika perpustakaan desa dilengkapi dengan fasilitas sarana bermain.

2. Kriteria kedua yaitu memiliki akses cepat, tepat dan mampu memberikan layanan secara maksimal. Kriteria kedua ini diwujudkan dengan beberapa kegiatan.

Kegiatan pertama yaitu aplikasi *insite 3*. Aplikasi yang bertujuan untuk membantu mempermudah masyarakat dalam mencari bahan pustaka dan melakukan pendaftaran keanggotaan perpustakaan daerah. Aplikasi *insite 3* dapat dijalankan secara online dan offline. Sehingga dapat diakses oleh masyarakat baik di perpustakaan maupun diluar perpustakaan.

Aplikasi *insite 3* diimplementasikan untuk mengubah cara pencarian buku dari manual menjadi digital. Perubahan ini akan berdampak juga pada perubahan perilaku pemustaka ketika mengakses koleksi perpustakaan.

Perubahan dari manual ke digital serta perubahan perilaku masyarakat dalam mencari buku atau bahan pustaka ini yang menjadi kebaruan dari penggunaan aplikasi *insite 3*. Kebaruan ditekankan pada pergeseran media pencarian (manual ke elektronik) dan perilaku pemustaka.

Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan teknologi. Seperti yang telah diketahui, Perpustakaan nasional Republik Indonesia, telah sejak

Samsara, Ladiatno: "Strategi Inovasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Banggai Untuk Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat"

lama menggunakan pencarian berbasis teknologi informasi. Hal ini yang juga diimplementasikan di perpustakaan daerah.

Selain itu, dalam aplikasi ini juga terdapat media pendaftaran anggota perpustakaan secara digital. Pendaftaran secara digital akan menjadi alternatif pendaftaran anggota perpustakaan. Sebelumnya pendaftaran perpustakaan baru bisa dilakukan secara manual.

Penggunaan aplikasi oleh pemustaka setidaknya akan mengubah mindset penggunaan teknologi. Hal ini yang paling mendasar manfaat yang akan bisa dirasakan oleh masyarakat dengan penggunaan *insite 3*.

Secara perlahan-lahan masyarakat akan mengenal dan familiar dengan penggunaan teknologi informasi. Khususnya bagi masyarakat yang bukan pelajar (siswa dan mahasiswa), masyarakat umum. Yang akses untuk menggunakan teknologi informasi kemungkinan besar terbatas.

Manfaat lainnya, pencarian buku lebih efisien. Hal ini karena bisa menggunakan keyword judul maupun nomor registrasi. Pencarian buku tidak memerlukan waktu yang lama. Bagi pemustaka maupun pengelola perpustakaan.

Pada saat ini, implementasi dilakukan untuk perpustakaan daerah. Hal ini dilakukan sebagai *pilot project* penggunaan aplikasi *insite 3*. Tindak lanjut dari implementasi *insite 3* adalah pengenalan aplikasi serta penggunaannya pada perpustakaan desa dan sekolah.

Akan tetapi, dalam implementasinya masih diperlukan banyak publikasi dan promosi. Bahkan bisa juga dilakukan simulasi penggunaan *insite 3* ke sekolah, perguruan tinggi, bahkan masyarakat umum. Sekaligu sosialisasi pentingnya menjadi anggota perpustakaan.

Sosialisasi menjadi tahap yang paling krusial untuk memperkenalkan *insite 3*. Hal ini dikarenakan, masyarakat yang masih belum sepenuhnya familiar dengan perpustakaan dan penggunaan teknologi. Oleh sebab itu, pendekatan dalam sosialisasi dilakukan dengan praktik langsung penggunaan aplikasi.

Terkait dengan kesesuaian dengan sistem diluarnya, aplikasi *insite 3* sejalan dengan amanat pelayanan publik. Seperti halnya yang diamatkan pada Undang-Undang No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, Pasal 4, disebutkan bahwa pelayanan publik memiliki beberapa asas. Salah satunya adalah kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Aplikasi *insite 3* relevan dengan asas tersebut. *Insite 3* diimplementasikan untuk memotong waktu pencarian buku maupun koleksi

perpustakaan dan memudahkan anggota untuk mendaftar sebagai anggota perpustakaan.

Selain itu, pada Undang-Undang No. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, pada pasal 14 bab tentang layanan perpustakaan dijelaskan pada ayat tiga bahwa setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan *Insite 3* sebagai bagian dari perkembangan teknologi informasi, sehingga juga relevan dengan amanat di Undang-Undang No.43 tahun 2007 tentang perpustakaan.

Selain mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, kecepatan akses layanan ke masyarakat juga dilakukan dengan mengimplementasikan sistem jemput bola. Sistem yang sebenarnya sudah sering dilakukan oleh hampir seluruh perpustakaan daerah. Bahkan di beberapa tempat.

Begitu juga dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Banggai, juga memiliki program perpustakaan keliling. Namun, perpustakaan keliling yang dilakukan terdapat modifikasi. Perpustakaan keliling dipadukan dengan pembukaan taman baca Potoutusan khusus di tempat wisata.

Hal ini dikarenakan Kabupaten Banggai memiliki potensi wisata yang relative memadai. Sehingga, pembukaan perpustakaan di lokasi wisata menjadi strategi untuk meningkatkan budaya literasi.

Perpustakaan keliling dan taman baca di tempat wisata dilakukan untuk mempromosikan perpustakaan serta berupaya mendekatkan perpustakaan pada masyarakat serta wisatawan. Akan tetapi, layanan perpustakaan dan taman baca di lokasi wisata memiliki target yang spesifik, yaitu masyarakat yang sedang berada di lokasi wisata. Oleh sebab itu, koleksi yang ditawarkan juga spesifik. Misal terkait dengan bacaan ringan dan informasi wisata di Kabupaten Banggai.

Spesifikasi juga disesuaikan dengan potensi wisata yang ada. Misalnya, untuk potensi wisata laut, maka referensi yang tersedia juga terkait pengetahuan tentang laut. Begitu juga untuk wisata alam seperti air terjun, ketersediaan koleksi perpustakaan juga menyesuaikan.

Namun, terdapat juga koleksi yang generik. Misalnya terkait sejarah Kabupaten Banggai. Koleksi ini akan menjadi potensi untuk wisata sejarah tanpa perlu mendatangi museum atau tempat bersejarah.

Penggabungan antara perpustakaan keliling dengan taman baca khusus daerah wisata merupakan kegiatan inovatif. Hal ini dikarenakan, program ini menjadi program baru

Samsara, Ladiatno: "Strategi Inovasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Banggai Untuk Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat"

bagi Dinas Perpustakaan dan Arsip. Program yang dikembangkan dari perpustakaan keliling. Selain itu, program ini sebelumnya merupakan program yang tidak lazim. Karena mayoritas perpustakaan lebih dekat dengan fasilitas pendidikan. Namun, khusus untuk perpustakaan keliling dengan taman baca khusus daerah wisata, perpustakaan mendekati lokasi wisata.

Implementasi perpustakaan keliling dengan taman baca khusus daerah wisata tidak berjalan setiap hari. Namun, disesuaikan dengan kunjungan ke objek wisata. Biasanya dilakukan pada hari libur.

Strategi lain untuk meningkatkan budaya literasi dengan membuka agenda rutin untuk perpustakaan. Agenda rutin yang akan dilakukan adalah dengan menempatkan pojok baca "Simputnyo".

Pojok baca "Simputnyo" merupakan kegiatan untuk membuka ruang baca serta bahan bacaan di tempat strategis yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Penempatan ini misalnya di kantor pemerintah yang memberikan layanan, tempat berkumpulnya masyarakat atau alun-alun serta perbankan.

Pembukaan pojok baca "Simputnyo" bertujuan untuk mengenalkan kebiasaan membaca bagi masyarakat. Pengenalan dimulai dari yang sederhana. Misalnya penyediaan surat kabar lokal. Dengan adanya surat kabar lokal, masyarakat Kabupaten Banggai minimal mengetahui informasi yang berkembang pada saat itu.

Pembukaan pojok baca juga menjadi bagian dari perluasan jenis layanan yang diamanatkan pada pasal 14 Undang-Undang No.43 tahun 2007 tentang perpustakaan, layanan perpustakaan yang dilakukan secara prima.

Program pojok baca "Simputnyo" menjadi kegiatan inovatif. Hal ini apabila dianalisa menggunakan kriteria inovasi, unsur inovasi telah terpenuhi. Misalnya aspek kebaruan. Pojok baca "Simputnyo" merupakan kemasan baru layanan perpustakaan secara prima. Sebagai kemasan baru untuk layanan prima, Pojok Baca dilakukan lebih eksplosif dengan mendatangi tempat keramaian. Serta mendirikan perpustakaan mini di lokasi ramai masyarakat.

Walaupun sebenarnya tidak bisa disebut sebagai perpustakaan, karena beberapa unsur perpustakaan tidak terpenuhi, keberadaan pojok baca "Simputnyo" bisa memberikan sumbangsih informasi. Hal ini yang menjadi tujuan penting mendekati perpustakaan ke masyarakat.

Diluar strategi diatas, Dinas Perpustakaan dan Arsip juga menginjeksi inovasi teknologi dalam pengelolaan arsip. Khususnya arsip yang terkait dengan sejarah Kabupaten Banggai.

Arsip digital menjadi pilihan untuk memindahkan penyimpanan arsip. Sebelumnya arsip disimpan secara manual dengan memberikan nomor register pada dokumen. Arsip manual akan digantikan dengan arsip digital.

Arsip digital akan sejalan dengan program *inslite 3*. *Inslite 3* memiliki tanggung jawab untuk menyediakan program serta layanan ke masyarakat, Sedangkan arsip digital menjadi salah satu isi atau *content* yang terdapat didalam program *inslite 3*.

Ketersediaan arsip digital atau elektronik, akan menjadi pendukung beberapa program dan kegiatan perpustakaan untuk meningkatkan budaya literasi. Dengan keleuasaan akses terhadap arsip, pembelajaran literasi dapat dilakukan di berbagai tempat.

Arsip digital atau elektronik menurut International Council of Archives (ICA) *electronic record is a record that is suitable for manipulation, gransmission or processing by a digital computer* (Rifauddin, 2016). Arsip yang diolah menggunakan bantuan teknologi komputer.

Pengelolaan arsip secara digital memiliki manfaat khususnya bagi arsip itu sendiri. Hal ini dikarenakan terdapat arsip yang berusia tua sehingga kadar kualitas kertas semakin menurun. Apabila disimpan secara manual, dengan bertambahnya usia dokumen, maka perlu perawatan khusus. Terlebih dokumen yang sering dibutuhkan oleh banyak orang. Sehingga perlu penanganan khusus untuk menyentuh dokumen tersebut.

Namun, dengan penggunaan digital, risiko akan kerusakan data dapat diminimalisir. Walaupun masih memiliki risiko data hilang atau rusak karena system bermasalah. Namun, penggunaan arsip digital akan lebih efisien. Terutama ketika arsip yang sering diakses oleh banyak orang. Tidak terdapat kekhawatiran dokumen akan rusak karena bersinggungan dengan banyak orang.

Manfaat lainnya terkait proses pencarian dokumen. Dokumen yang disimpan secara manual, untuk pencarian dokumen, akan mengandalkan nomor register dokumen. Hal ini akan berbeda dengan penyimpanan secara digital. Terdapat banyak kata kunci yang bisa digunakan untuk menemukan dokumen. Sehingga proses pencarian dokumen akan lebih efisien.

Beberapa kegiatan diatas menjadi strategi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Banggai untuk mendukung budaya literasi masyarakat. Kegiatan-kegiatan diatas, menjadi stimulus agar masyarakat bisa merubah mindset bahwa literasi menjadi sebuah kebutuhan.

Samsara, Ladiatno: "Strategi Inovasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Banggai Untuk Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat"

Akan tetapi, untuk bisa mengubah mindset masyarakat, juga diperlukan *supporting* dari tim internal Kabupaten Banggai, khususnya Dinas Perpustakaan dan Arsip. Bentuk *supporting* bisa dilakukan dengan berbagai macam.

Dukungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Banggai untuk meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat.

Strategi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip diatas, dalam implementasinya, juga perlu penguatan internal organisasi. Hal ini untuk menunjukkan kesiapan dan komitmen organisasi dalam mendukung terciptanya budaya literasi di masyarakat.

Penguatan internal yang dilakukan diantaranya:

1. Kepemimpinan yang kuat

Kepemimpinan yang kuat berarti kepemimpinan yang memiliki arah atau visi yang jelas. Visi yang jelas menjadikan organisasi memiliki pijakan untuk berjalan. Pijakan untuk melangkah dalam beberapa waktu ke depan.

Dalam konteks Dinas Perpustakaan dan Arsip, kepemimpinan yang kuat bisa dimiliki oleh kepala OPD. Kepala OPD memiliki visi yang jelas dan terukur. Apabila dalam konteks pengembangan budaya literasi, maka visi yang akan dituju berupa terinternalisasinya budaya literasi di masyarakat.

Internalisasi budaya literasi dilakukan melalui berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut yang perlu di kawal secara intensif. Salah satunya terkait inovasi yang telah dijabarkan diatas.

Selain melalui visi, kepemimpinan yang kuat juga diwujudkan dalam delegating job secara proporsional. *Delegating job* diberikan secara proporsional, sesuai tugas dan jabatan. *Delegating job* juga diberikan secara detail dan terukur, sehingga masing-masing pegawai mampu untuk menjalankan pekerjaan masing-masing secara terukur.

2. Pengembangan Kompetensi Pegawai secara holistik

Pengembangan kompetensi pegawai menjadi kewajiban bagi setiap pegawai. Dalam undang-undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa pengembangan kompetensi pegawai PNS minimal 20 Jam Pelajaran.

Khusus untuk pengembangan kompetensi pegawai di Dinas Perpustakaan dan Arsip serta pengelola perpustakaan, untuk mendukung peningkatan budaya literasi masyarakat, arah pengembangan kompetensi dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam mendukung strategi peningkatan budaya literasi.

Salah satunya terkait penggunaan teknologi informasi. Tuntutan adanya penggunaan teknologi informasi dalam layanan perpustakaan membuat pegawai yang terdapat di Dinas Perpustakaan dan Arsip juga diwajibkan memiliki kompetensi penggunaan teknologi informasi, khususnya aplikasi.

Selain itu, kompetensi lain yang diperlukan terkait promosi perpustakaan. Hal ini penting karena promosi perpustakaan akan selaras dengan percepatan implementasi budaya literasi masyarakat.

Selain itu, kemampuan untuk membuka mindset diri juga diperlukan. Membuka mindset untuk bisa melihat dan mengoptimalkan peran perpustakaan. Hal ini dilakukan agar sejalan dengan kebutuhan perpustakaan.

Perubahan mindset juga diperlukan karena kondisi existing Dinas perpustakaan dan Arsip belum terlalu kuat untuk melakukan transformasi. Hal ini dikarenakan beberapa anggapan bahwa Dinas Perpustakaan dan Arsip merupakan unit kerja kelas dua dan diisi dengan pegawai yang memiliki kompetensi yang belum memadai masih mengakar dengan kuat. Oleh sebab itu, wajib ada perbaikan mindset. Perubahan mindset dari unit yang dianggap *nothing* menjadi *something*.

Salah satunya dengan mengembalikan kepercayaan diri pegawai. Kepercayaan diri untuk bisa memiliki kontribusi yang lebih bagi organisasi. Kepercayaan bahwa Dinas Perpustakaan dan Arsip juga memiliki sumbangsih dalam pencapaian visi dan misi daerah.

Salah satu cara yang bisa dilakukan dengan membuka kesempatan yang lebih luas bagi pegawai untuk bisa memberikan sumbangsih ide dan gagasan. Sumbangsiah ide dan gagasan untuk mengakomodasi pemikiran pegawai berkaitan dengan pengembangan organisasi.

Beberapa kegiatan yang telah dideskripsikan dalam strategi diatas merupakan perluasan dari peran perpustakaan. Misalnya pembukaan pojok baca “Simputnyo” dan taman baca “Potoutusan”. Kedua kegiatan ini adalah upaya perluasan bentuk perpustakaan. Perluasan untuk mentransformasikan perpustakaan menjadi unit yang lebih terbuka dan adaptif.

Penutup

Strategi inovasi perpustakaan menjadi salah satu cara untuk bisa meningkatkan budaya literasi masyarakat. Strategi inovasi dilakukan dengan membuka peluang perpustakaan untuk bisa melakukan hal yang lebih baik dari pada sebelumnya. Beberapa

Samsara, Ladiatno: "Strategi Inovasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Banggai Untuk Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat"

kegiatan yang dilakukan diantaranya membangun kemitraan dengan pihak lain, satu desa satu perpustakaan, aplikasi *insite 3*, perpustakaan keliling dan taman baca Potoutusan di tempat wisata, Pojok baca Sumputnyo dan pengelolaan arsip secara digital.

Strategi inovasi yang dilakukan diatas, didukung peran internal Dinas Perpustakaan dan Arsip yaitu kepemimpinan yang kuat dan pengembangan kompetensi pegawai secara holistik. Kedua peran ini dilakukan secara beriringan untuk mendukung implementasi inovasi di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Banggai.

Daftar Pustaka

- Budaya, G., & Indonesia, L. (2018). Library, the defender of indonesian lieracy culure, 8(2), 180–193.
- Hildawati Almah. (2013). Membangun Inovasi di Perpustakaan Perguruan Tinggi Melalui Konsep KM (Knowledge Management). *Khizanah Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan*, 1(2), 91–100. Retrieved from <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/khizanah-al-hikmah/article/view/33/>
- Mursalim. (2017). “Penumbuhan Budaya Literasi dengan Penerapan Ilmu Keterampilan Berbahasa (Membaca dan Menulis).” *CaLLs*, 3(1), 31—38.
- Nadlir, Moh .(2018).Per Hari, Rata-rata Orang Indonesia Hanya Baca Buku Kurang dari Sejam.<https://nasional.kompas.com/read/2018/03/26/14432641/per-hari-rata-rata-orang-indonesia-hanya-baca-buku-kurang-dari-sejam>. Editor Diamanty Meiliana. akses 18 Juni 2019.
- Nafisah, A. (2014). Arti penting perpustakaan bagi upaya peningkatan minat baca masyarakat. *Jurnal Perpustakaan Libraria*, 2(2), 70–81.
- Nugraha, Q. (2014). Manajemen Strategis Pengertian Manajemen Strategis, 1–51.
- Pusat, T., & Tata, I. (n.d.). *Handbook Inovasi*.
- RI, P. N. (2011). *Profil Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia*. Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca.
- Rifauddin, M. (2016). Pengelolaan Arsip Elektronik Berbasis Teknologi. *Khizanah Al-Hikmah*, 4(2), 168–178. <https://doi.org/10.24252/kah.v4i27>
- Republik Indonesia.Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Republik Indonesia.Undang-Undang No.43 tahun 2007 tentang Perpustakaan
- Rizki Subekja. (2017). Manajemen Strategik. *Jurnal UMM*.

Samsara, L. (2017). *No Title*.

Seminar, P., Bulan, N., & Unib, B. (2015). Adem Ayem, 146–156.

Suwarno, Y. (2006). Inovasi di Sektor Publik, (October), 1–19.